

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah menjadikan peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan kesehatan terbantu oleh pemerintah daerah. Dengan demikian tanggung jawab pemerintah pusat beralih ke pemerintah daerah dalam bidang pelayanan kesehatan, namun pemerintah pusat masih mempunyai kewajiban untuk penyediaan obat program kesehatan dan persediaan penyangga (buffer stock) serta jaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat. Berlakukannya otonomi daerah setiap Kabupaten/Kota mempunyai struktur dan kebijakan sendiri dalam pengelolaan obat, yang selanjutnya ke Unit Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota (Kemenkes RI 2015).

Pada penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilakukan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Ruang farmasi sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian terbatas salah satunya yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang mana di bawah pembinaan dan pengawasaan apoteker yang di tunjukoleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Depkes RI 2016).

Pelayanan kefarmasian salah satunya adalah Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan (Depkes RI 2016).

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2013), terdapat pemberian obat ke puskesmas yang tidak sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang diusulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (terdapat obat tertentu yang mengalami kekurangan dan kelebihan) sehingga penggunaan anggaran kurang efektif dan efisien. Menurut (Hartono 2007), masalah lain yang ditemui yaitu masih terdapat laporan data kunjungan umum pasien di beberapa Puskesmas tertentu yang kurang akurat dan reliabel. Hal ini akan menyebabkan permintaan obat ke gudang farmasi Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil di Puskesmas. Dengan demikian pemakaian obat di Puskesmas tidak sesuai dengan pelaksanaan pengobatan yang sebenarnya. Sehingga perencanaan kebutuhan obat tidak tepat.

Menurut (Malasai *et al.*, *n.d.* 2016) pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa masalah kekosongan obat di Puskesmas Modayang menjadi masalah yang sering dijumpai setiap tahunnya faktor-faktor penyebab kekosongan yaitu tidak tersediannya stok obat di Dinas Kesehatan karena faktor seperti waktu tunggu yang relatif lama, pendanaan yang kurang sesuai dan kurang respon dari distributor obat. Hal lain dari sebuah proses pengadaan yang efektif akan menjamin ketersediaan obat yang tepat dengan kuantitas yang tepat, pada harga pantas dan pada standar kualitas diakui. Kegiatan penerimaan dan pemeriksaan obat merupakan salah satu kegiatan dalam tahap pengadaan obat. Karena ketidaksesuaian prosedur pengadaan obat dengan aturan yang berlaku merupakan salah satu masalah yang terjadi dalam hal pengadaan obat. Dan hal ini akan berdampak kepada ketersediaan obat di suatu unit pelayanan kesehatan (Safriantini *et al.* 2011).

Perencanaan kebutuhan obat dapat dicapai dengan menggunakan berbagai metode analisis diantaranya analisis ABC. Metode ABC membantu pengendalian persediaan sehingga dapat memberikan informasi dalam rangka memprioritaskan pengadaan obat (Farmasi, Prof, and Manado 2016). Pada observasi awal didapatkan bahwa jumlah pemenuhan item obat di Puskesmas Tambak II tidak seratus persen memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu apoteker harus mampu mengendalikan obat dengan baik, guna menghindari kekosongan obat yang terlalu lama. Analisis ABC merupakan salah satu

metode melakukan system pengendalian persediaan, sangat berguna dalam memfokuskan perhatian manajemen dalam memprioritas pengendalian obat-obat. Penelitian ini di lakukan di puskesmas Tambak 2 dengan adanya apoteker pengelola. Dalam hal ini apoteker memiliki peran yang penting dan proses pengelolaan obat di puskesmas, karena menurut (Depkes RI 2016) pada ruang farmasi di puskesmas apoteker sebagai orang yang bertanggung jawab memiliki kompetensi manajemen logistic. Manajemen logistic aspek yang sering bermasalah pada internal puskesmas. Proses manajemen logistik obat di Puskesmas belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik dan terjadi ketidaksesuaian antara permintaan dan pemberian obat di puskesmas. Hal ini yang menjadikan landasana bagi peneliti mengevaluasi proses perencanaan dan pengadaan obat dengan metode analisi ABC dengan adanya apoteker pengelola di puskesmas Kabupaten Banyumas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang muncul dan akan di teliti yaitu

1. Bagaimanakah hasil evaluasi perencanaan obat di Puskesmas Tambak II sesuai dengan Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Puskesmas?
2. Bagaimana pengelompokan obat yang digunakan pada Puskesmas Tambak II berdasarkan Analisis ABC?

## **C. Tujuan**

Tujuan khusus penelitian ini yaitu

- a. Mengevaluasi dan mengetahui proses perencanaan obat di Puskesmas Tambak II
- b. Mengetahui nilai pemakaian obat dan profil kelompok obat Aberdasarkan metode analisis ABC

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi institusi kesehatan dan puskesmas

Memberikan masukan berbaikan terhadap instansi terkait dalam perencanaan obat di puskesmas. Terutama pada proses perencanaan kebutuhan obat di puskesmas dan sebagai referensi yang dapat menunjang proses belajar mengajar untuk kepentingan pendidikan dan penelitian terutama tentang perencanaan kebutuhan obat publik

2. Bagi institusi pendidikan

Diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan pengetahuan tentang evaluasi perencanaan obat dan membantu membangun sistem pengendalian obat agar kebutuhan obat dapat efisien dan ketersediaan obat dapat terjaga dengan baik di puskesmas.

3. Bagi peneliti

Dapat meningkatkan kemampuan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwwokerto